

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

a. Pengertian gapoktan

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, (4) Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.

Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani

dan anggota masyarakat pedesaan. Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan.

Gapoktan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

(1) Gapoktan pemula

Gapoktan dibentuk dan dipersiapkan oleh tim teknis sebagai program Kementerian Pertanian telah melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelolaan Gapoktan. Setelah pelatihan maka dilakukan pendampingan oleh penyuluh dan PMT dengan maksud dan harapan dana penguatan modal usaha.

Ciri – Ciri Gapoktan pemula :

- a) Gapoktan dapat mengkoordinasi anggota untuk memanfaatkan dana penguatan modal usaha dalam membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan. Penyaluran dana setelah sesuai dengan Rencana Usaha Bersama.
- b) Seluruh anggota sepakat untuk menggulirkan dana dalam bentuk simpan pinjam serta mempunyai aturan yang disepakati dan diikuti seluruh anggota masyarakat namun

tidak maksimal dalam mengorganisir dana masyarakat dalam rangka penambahan aset.

- c) Berdasarkan indikator-indikator penilaian kinerja Gapoktan maka Gapoktan pemula berada pada skala nilai 0 s/d 105.

(2) Gapoktan madya

Gapoktan Madya merupakan Gapoktan Pemula yang dibina dan didampingi secara baik oleh tim teknis kab/kota sehingga dapat meningkatkan tingkat keswadayaan kepengurusan dan organisasi serta dana. Ciri –ciri gapoktan madya :

- a) Adanya kesungguhan anggota dan pengurus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan meningkatkan akumulasi dana, keswadayaan dana dari anggota dan meningkatkan laba dari operasional dana bantuan modal usaha.
- b) Gapoktan telah dapat membagi struktur kepengurusan khusus mengelola dana dalam format simpan pinjam.

(3) Gapoktan utama

Gapoktan yang sudah mengelola dan menjaga pengaliran dana serta dana keswadayaan dalam format usaha simpan pinjam.

Ciri-ciri gapoktan utama yaitu :

- a) Gapoktan secara reguler dan konsisten telah melaksanakan rapat anggota.

- b) Sudah membagi kepengurusan pada Gapoktan.
- c) Sudah memiliki aturan organisasi AD/ART.
- d) Memiliki pencatatan atau pembukuan manajemen yang baik.
- e) Sudah menerapkan pola dan sistem pelayanan anggota.
- f) Memiliki dana keswadayaan yang tumbuh secara progresif.

b. Fungsi gapoktan

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan dalam gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kelompok tani ke dalam gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke

sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar. Fungsi gapoktan antara lain :

- 1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga)
- 2) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya
- 3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan
- 4) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah
- 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

2. Tinjauan Pemberdayaan Petani

a. Pengertian pemberdayaan

Banyak pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, semua pengertian tersebut mengarah pada bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera. Pemberdayaan atau *empowerment*, berasal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan, dalam kamus bahasa diartikan sebagai berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan-perlindungan hukum, memberikan

seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu, menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak. Pengertian lain pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 56-59).

Secara konseptual pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Isbandi Rukminto Adi, 2008: 78-79).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Pemberdayaan harus menjadi tujuan dari semua pembangunan masyarakat. Pengembangan masyarakat, bagaimanapun, dapat memiliki tujuan pemberdayaan lebih sederhana. Setiap peningkatan pemberdayaan untuk bagian yang lebih kurang beruntung dari masyarakat akan membantu untuk membawa masyarakat yang lebih adil secara sosial, dan pemberdayaan anggota masyarakat lokal berbasis struktur untuk diletakkan di tempat. Demikian pula, setiap strategi yang memperkuat struktur yang menentang pemberdayaan mungkin justru melemahkan dari pada memperkuat kegiatan masyarakat. Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

Kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku ke 2 untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku ke 2. Oleh karena itu, pemberdayaan*would have be having or being given power to influence or control* (Onny S Prijono & A.M.W Pranarka, 1996: 63). Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu. Dalam keadaan tersebut, masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka,

akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ada suatu kontradiksi di dalam ide pemberdayaan individu karena orang cenderung menjadi terbatas (*restricted*) dalam kehidupan mereka atau cenderung menguasai orang lain sebagai hasil dari hubungan-hubungan sosial dan struktur-struktur diluar kontrol mereka sendiri. Menurut Paulo Freire pemberdayaan perlu dipikirkan dalam konteks sosial (Onny S Prijono & A.M.W Pranarka, 1996: 63) :

“.....The question of social class empowerment....makes ‘empowerment’ much more than an individual or psychological event. It points to a political process by the dominated classes who seek their own freedom from domination – a long historical process”.

Sementara itu menurut Hulme dan Turner berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri

mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*) ke pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Di dalam literatur pembangunan, “konsep pemberdayaan” bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. Bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif antara lain menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian. Selain itu pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling

terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan). Penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan

berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi (1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. (2) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan berbagai masukan dan peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dan fasilitas-fasilitas yang ada.

Sejatinya bahwa upaya pemberdayaan juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun suatu proses. Pemberdayaan suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahap-tahap kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang. Pemberdayaan suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu dan bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Hal tersebut juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

b. Pengertian pemberdayaan petani

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Pemberdayaan

masyarakat petani adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan. Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Lalu, menjelang dan awal Pelita I, melalui program Bimbingan Massal Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan besar-besaran. Walaupun demikian, praktis sejak perang kemerdekaan orientasi kegiatan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras.

Puncak pengaruh langsung maupun tidak langsung pelaksanaan penyuluhan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, yaitu beras yang diakui secara internasional pada sidang FAO 1985 di Roma (Pambudy dan A.K Adhy, 2001: 92-99). Namun, landasan penyuluhan yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan atau institusi (pendidikan atau pemerintahan atau birokrasi) yang juga lebih berorientasi pada peningkatan produksi sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) juga perlu ditinjau kembali.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat “bungkus baru namun isi lama”. Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, “model ekonomi kerakyatan” secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini. Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat (Adi Sasono, 1999: 13-15). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada

terbentuknya kemandirian petani, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna.

Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya. Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut adalah merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja dituntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasil gunakan potensi sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat petani (Pambudy dan A.K.Adhy, 2001: 68-82) menuju kemandirian petani, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

- a) Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro–makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan atau pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat atau lokal di wilayah tugasnya masing-masing.
- b) Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.
- c) Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi atau kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih

menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

- d) Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.
- e) Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, *topdown* dan *linier* (Sumardjo, 1998) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah.

f) Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

g) Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan

usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat).

- h) Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

Dengan memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani antara lain :

- a) Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan

produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, HNSI dan organisasi lokal lainnya.

- b) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan, misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.
- c) Kemampuan kelompok petani dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, *service provider*, *equipment provider*, *cargo*, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi atau inovasi baru, jaringan pasar, informasi

kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu (Adi Sasono, 2000: 5-7).

d) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para petugas penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

Melihat kondisi ketidak berdayaan petani secara ekonomi yang diperberat oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka maupun adanya intervensi pihak luar, maka usaha-usaha untuk memberdayakan kelompok masyarakat ini mendesak untuk dilakukan. Tanpa mengurangi arti penting usaha-usaha lain untuk mengatasi masalah petani, dibawah ini dikemukakan suatu pemikiran untuk memberdayakan kelompok petani berlahan sempit dan tak berlahan. Program transmigrasi peningkatan pendidikan dan peningkatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan merupakan tiga strategi utama untuk meningkatkan pemberdayaan petani miskin:

a) Transmigrasi

Bagi petani berlahan sempit dan yang tak berlahan di Jawa, apabila tetap ingin bertahan di bidang pertanian, transmigrasi keluar Jawa merupakan usaha yang logis dalam memperoleh areal pertanian yang memadai sebagai faktor produksinya. Transmigrasi sendiri telah lama dilakukan sejak masih dalam masa pemerintahan kolonial Belanda. Motivasi pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa pada waktu itu adalah karena adanya kekhawatiran akan kepadatan penduduk di pulau Jawa dan dikaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja pertanian di luar pulau Jawa. Kolonisasi petani-petani mandiri sebagai perintis pertanian yang dapat mengembangkan daerah pemukiman adalah orang-orang unggulan (Onny S Prijono & A.M.W Pranarka, 1996:166-170). Tetapi usaha ini dilakukan terutama untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.

Pemindahan penduduk keluar Jawa pada masa kemerdekaan telah mementingkan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan penduduk miskin pada umumnya di Jawa. Banyak temuan studi yang menunjukkan bahwa pada umumnya keberhasilan petani transmigran dikarenakan mereka sudah mampu membawa

modal dari desa asal dan dasar pendidikan yang relatif berfungsi.

b) Peningkatan Pendidikan

Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya pemberdayaan penduduk pedesaan yang perlu segera dilakukan. Usaha pemerataan untuk memperoleh pendidikan tercermin pada kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu diberi bobot yang konkrit dalam melihat fenomena situasi pedesaan baik secara nasional maupun daerah masing-masing sangat membantu anak dalam menentukan masa depannya. Mereka juga perlu diberi gambaran bagaimana jalan menuju masa depan yang lebih baik, serta bagaimana apabila mereka tetap ingin bertani seperti orang tua mereka.

Guru dalam hal ini dapat membantu, misalnya dengan memberikan gambaran tentang kemungkinan bertransmigrasi. Dengan demikian konsep transmigrasi akan dipahami sejak dini, untuk kemudian menimbulkan rasa keinginan. Demikian pula halnya jika anak tidak ingin menjadi petani, guru memberikan gambaran mengenai sektor modern akan membantu anak didik mengenai pemahaman anak didik diluar sektor pertanian.

c) Pengaktifan Kelembagaan

Strategi terakhir untuk meningkatkan keberdayaan petani adalah dengan melalui pengaktifan kelembagaan. KUD selama ini bercerita kurang baik karena penyelewengan–penyelewengan yang dilakukan pengurusnya, perlu mendapatkan pengawasan yang semakin ketat. Selain pengawasan yang ketat pengurus KUD harus mendapat pendidikan manajemen, serta mengenai model organisasi modern, dinamika pembangunan ekonomi secara menyeluruh maupun tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Saat ini telah dibentuk kelembagaan yang baru dengan harapan para petani mampu berperan aktif dalam berdirinya lembaga tersebut sehingga kehidupan petani dimasa yang akan datang dapat lebih baik lagi. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap desa, juga harus menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Ada dua kebijakan penting akhir-akhir ini, yaitu pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Undang Undang Nomor 16 tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-Undang ini merupakan impian lama kalangan penyuluhan yang sudah diwacanakan semenjak awal tahun 1980-an. Lahirnya UU ini dapat pula dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan revitalisasi pertanian tersebut. Pada kedua kebijakan tersebut, permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Departemen Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan di setiap desa khususnya yang berbasiskan pertanian. Ini merupakan satu lembaga andalan baru yang diinisiatifkan oleh Departemen Pertanian, meskipun semenjak awal 1990-an Gapoktan sesungguhnya telah dikenal. Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah gagalnya pengembangan kelompok dimaksud, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Secara konseptual, tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal atau ganda. Berbagai peran yang

dapat dimainkan sebuah lembaga adalah sebagai lembaga pengelolaan sumber daya alam (misalnya P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja sabbat sinambat), untuk pengembangan usaha (KUA dan koperasi), untuk melayani kebutuhan informasi (kelompok Pencapir), untuk tujuan representatif politik (HKTI), dan lain-lain.

Khusus untuk kegiatan ekonomi, ada banyak lembaga pedesaan yang diarahkan sebagai lembaga ekonomi, di antaranya adalah kelompok tani, koperasi, dan Kelompok Usaha Agribisnis. Secara konseptual, masing-masing lembaga dapat menjalankan peran yang sama (tumpang tindih). Koperasi misalnya, dapat menjalankan seluruh aktifitas agribisnis, mulai dari hulu sampai ke hilir. Namun, tampaknya ada keengganan sebagian pihak untuk menggunakan "koperasi" sebagai *entry point* untuk pengembangan ekonomi petani, yang mungkin karena kesan negatif yang selama ini disandangnya. Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih (opsi) di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktifitas ekonomi secara langsung.

3. Tinjauan Kelompok Sosial

a. Pengertian kelompok sosial

Manusia adalah makhluk yang mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lainnya. Berbeda dengan

binatang, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka timbulah apa yang disebut kelompok sosial (*social group*). Kelompok-kelompok sosial adalah himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila masyarakat tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok kelompok yang bersangkutan.
- 2) Ada hubungan timbal balik antara anggota-anggotanya.
- 3) Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama anggotanya sehingga hubungan antar mereka tambah erat.
- 4) Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

Dengan demikian kelompok sosial dapat dikatakan sebagai kumpulan dari individu-individu yang memiliki pola perilaku dan saling berhubungan serta berinteraksi, sehingga diantara mereka memiliki hubungan erat dan bahkan timbul adanya perasaan bersama. Sedangkan ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut:

- 1) Terdapat dorongan atau motif.
- 2) Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan.

- 3) Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok.
- 4) Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku.
- 5) Berlangsung suatu keputusan.
- 6) Adanya pergerakan yang dinamik.

Bentuk-bentuk kelompok sosial teratur (Soerjono Soekanto, 2010: 45-53) sebagai berikut :

- 1) *In Group dan Out Group*. Membedakan antara *in group* dan *out group*. *In Group* merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. *Out Group* merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan *in Group*.
- 2) Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya, kerja sama yang erat dan bersifat pribadi, interaksi sosial dilakukan secara tatap muka (Cooley dalam Soerjono Soekanto, 2010: 54-57). Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga sifatnya tidak begitu langgeng.

- 3) *Gemainschaft* dan *gesellschaft*. Hubungan antara individu-individu dalam kelompok sosial sebagai *Gemainschaft* (paguyuban) dan *gesellschaft* (patembayan). *Gemainschaft* merupakan bentuk-bentuk kehidupan yang di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat ilmiah, dan kekal. *Gesellschaft* (patembayan) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu (yang pendek) atau bersifat kontraktual (Sorjono Soekanto,2010: 54-57).
- 4) Kelompok Formal dan Informal. Membedakan kelompok Formal dan Informal. Kelompok Formal mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan mereka. Kelompok Informal tidak mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Kelompok ini terbentuk karena pertemuan berulang-ulang, misal kelompok dalam belajar.
- 5) Membership group dan reference group. Robert K. Merton membedakan kelompok *membership* dengan kelompok *reference*. Kelompok *membership* merupakan kelompok yang para anggotanya tercatat secara fisik sebagai anggota, sedangkan kelompok *reference* merupakan kelompok sosial yang dijadikan acuan atau rujukan oleh individu-individu yang tidak tercatat dalam anggota kelompok tersebut untuk

membentuk atau mengembangkan kepribadiannya atau dalam berperilaku (Soerjono Soekanto, 2010: 54-57).

Bentuk-bentuk kelompok sosial yang tidak teratur sebagai berikut :

- 1) Kerumunan (*crowd*) adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan disuatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan adalah sebagai berikut: (a) Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, (b) Kerumunan yang bersifat sementara (*casual crowds*), (c) Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum.

Pada awalnya manusia dikelompokkan secara sederhana tanpa aturan yang jelas. Pada tahapan selanjutnya pengelompokan manusia diatur dan ditata secara tertib. Kelompok sosial adalah kesatuan orang-orang yang memungkinkan kelompok itu mencapai tujuan yang tak bisa dicapai hanya dengan kegiatan yang seorang sendirian (*organization is an entities that enable society to pursue accomplishment that cannot be achieve by individual acting*). Kelompok sosial merupakan kelompok statis. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Untuk meneliti gejala tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut perihal dinamika kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial sifatnya lebih stabil

dari pada kelompok sosial lainnya, atau dengan kata lain strukturnya tidak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok.

Kelompok-kelompok yang mengalami perubahan cepat, walau tidak ada pengaruh dari luar. Akan tetapi pada umumnya kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi maupun reformasi dari pola-pola didalam kelompok tersebut, karena pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antar individu dalam kelompok atau karena adanya konflik antar bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau golongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya, ada kepentingan yang tidak seimbang, sehingga timbul ketidakadilan, ada pula perbedaan paham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok dan sebagainya. Kesemuanya itu mengakibatkan perpecahan diantara kelompok hingga timbul perubahan struktur.

Timbulnya struktur yang baru pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil (dikemudian hari). Tercapainya keadaan stabil sedikit banyak bergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi yang dengan berubahnya struktur, mungkin juga mengalami perubahan-perubahan. Perubahan struktur kelompok sosial karena sebab-sebab dari luar. *Pertama*

perlu diuraikan mengenai perubahan yang disebabkan karena perubahan situasi. Perubahan situasi yang dimaksud adalah keadaan dimana kelompok tadi hidup. *Kedua*, pergantian anggota-anggota kelompok. Pergantian anggota sesuatu kelompok sosial tidak perlu membawa perubahan struktur kelompok tersebut. *Ketiga*, perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi.

Maka dari itu dalam kegiatan yang dilakukan baik setiap pertemuan sering terjadinya perbedaan pendapat antar anggota gapoktan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dinamika kelompok sosial dimana gapoktan mengalami perubahan dan perkembangan kearah yang positif sebagai akibat adanya proses reformasi. Ketidak sepahaman pemikiran antar anggota gapoktan tersebut membuat gapoktan menjadi tidak stabil sehingga timbullah perpecahan, maka pemimpin merupakan faktor utama dalam dinamika kelompok sosial yang berperan sebagai pengambil keputusan.

b. Pengertian organisasi sosial

Istilah organisasi secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam masyarakat. Organisasi sosial yang merupakan gambaran dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari

berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur (Abdulsyani, 1992: 63-68).

Organisasi sosial dalam arti luas dapat diartikan sebagai jaringan tingkahlaku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, sekolah dan sebagainya. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan.

Terbentuknya organisasi sosial karena desakan minat kepentingan individu dalam lembaga sosial. Dalam organisasi sosial terdapat proses yang dinamis dimana hubungan antara manusia didalamnya senantiasa berubah-ubah, tindakan masing-masing orang terhadap orang lain selalu berulang-ulang dan terkoordinasi. Namun demikian dalam organisasi sosial mencirikan pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi seseorang disamping sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis juga bersifat struktural.

Bentuk dan struktur organisasi merupakan tempat yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia dengan berbagai aturan yang diakui bersama. Dikatakan demikian, oleh karena waktu, tempat, keadaan tertentu dalam rangka memprediksi

tujuannya sudah ditetapkan secara jelas dan diupayakan setidaknya setiap anggota memahami tujuan organisasinya itu. Dalam organisasi sosial, anggotanya tersusun atau terstruktur secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peranan yang bersifat formal, masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi sosial memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut :

- 1) Formalitas. Merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi.
- 2) Hierarkhi. Merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
- 3) Besarnya dan Kompleksnya. Dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.

- 4) Lamanya (*duration*). Menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

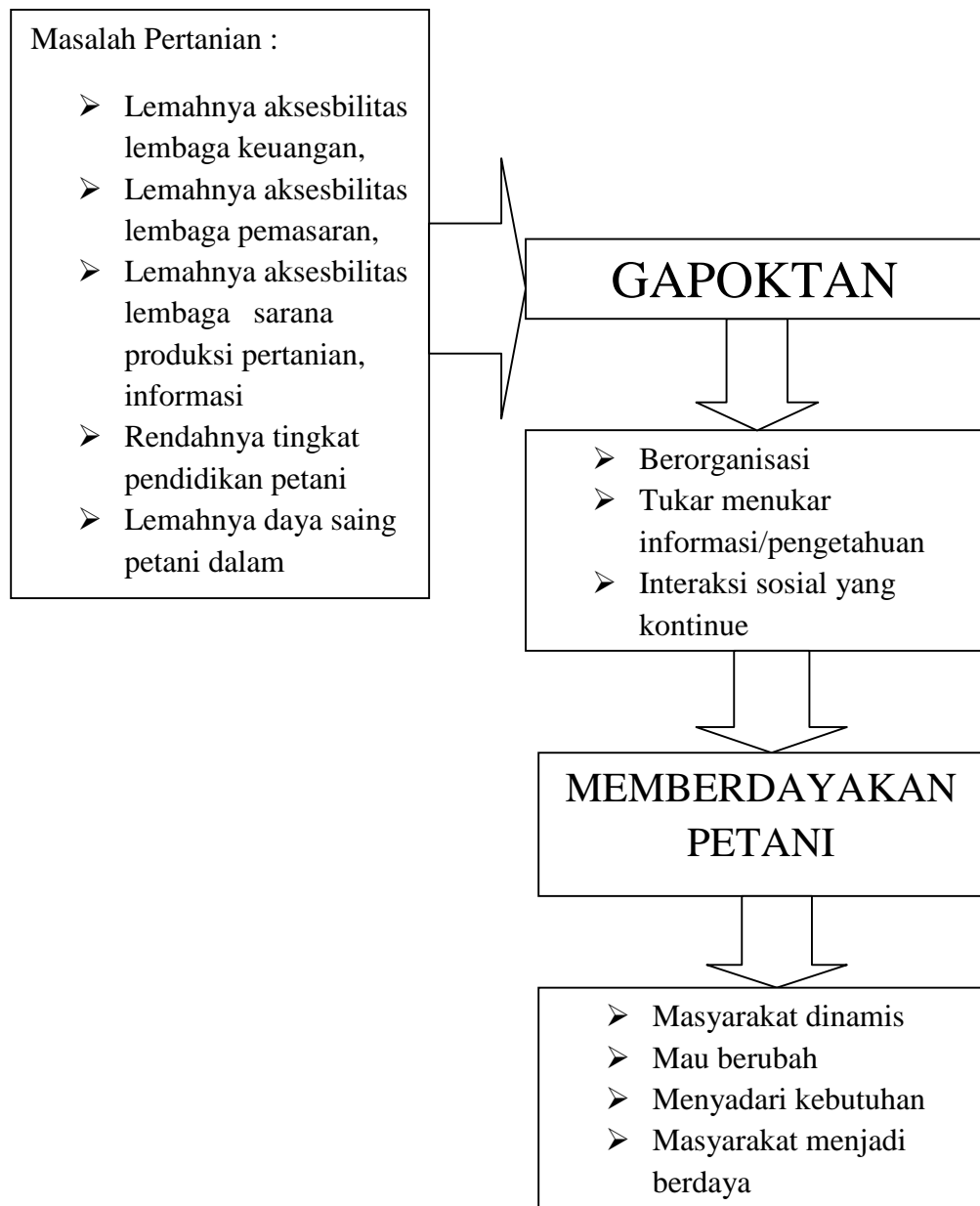
Dalam berorganisasi ada lima azaz organisasi yang harus diterapkan yaitu:

- 1) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, semua yang terlibat dalam usaha pencapaian tujuan akan berlaku tepat dan sebaliknya jika tujuan kabur maka kegiatan tidak mempunyai arti.
- 2) Organisasi harus mempunyai komando. Dengan adanya komando maka akan ada kesatuan arah (*unity of direction*) sebab dengan satu komando tujuannya dapat dilaksanakan.
- 3) Organisasi harus melakukan pembagian kerja dan pembagian tugas, sebab dengan pembagian kerja dan pembagian tugas akan timbul hak dan wewenang serta tanggung jawab masing masing anggota.
- 4) Organisasi harus mempunyai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas atau *delegation of authority and responsibility*.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana adalah kebutuhan vital yang harus tersedia agar kegiatan organisasi dapat berlangsung. Selain itu dalam

berorganisasi terjadi kegiatan saling belajar antar anggota organisasi.

B. Kerangka Berpikir

Untuk dapat melihat dan menggambarkan bagaimana kerangka berfikir serta mengetahui hubungan atau alur pemikiran peneliti, maka dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Gapoktan merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Berbagai macam permasalahan yang terjadi pada gapoktan desa Jendi menjadi penghambat yang cukup besar pada proses pemberdayaan petani. Permasalahan tersebut antara lain lemahnya aksesibilitas lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga sarana produksi pertanian dan informasi, rendahnya tingkat pendidikan petani serta lemahnya daya saing petani dalam pemasaran. Beberapa permasalahan tersebut menghambat terjadinya proses pemberdayaan, maka dari itu dengan dikeluarkannya peraturan menteri dan untuk menanggulangi permasalahan petani maka dibentuklah suatu organisasi yang bergerak dibidang pertanian yakni gabungan kelompok tani (gapoktan).

Dengan adanya gapoktan diharapkan anggota gapoktan mampu berorganisasi, mampu mengikuti aturan yang berlaku, dapat saling bertukar menukar informasi dengan sesama anggota gapoktan atau dengan tutor sehingga terjadi interaksi yang kontinue antar anggota gapoktan dengan tutor maupun dengan pengelola namun meski begitu masih sering terjadi ketidak sepahaman pemikiran antar anggota gapoktan sehingga membuat gapoktan menjadi tidak stabil maka timbullah perpecahan, pemimpin merupakan faktor utama dalam dinamika kelompok sosial yang berperan sebagai pengambil keputusan. Terjadinya proses pembelajaran hal tersebut sebagai suatu proses dinamika kelompok sosial dimana

perubahan dan perkembangan kearah yang positif sebagai akibat adanya proses reformasi.

Maka dengan adanya proses pembelajaran yang terjalin secara kontinue, berkesinambungan tersebut diharapkan mampu memberdayakan anggota gapoktan. Karena dengan adanya gapoktan tersebut maka anggota gapoktan mampu memperoleh informasi sehingga memperkaya pengetahuan anggota gapoktan sehingga anggota gapoktan menjadi berdaya. Dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan gapoktan diharapkan mampu memberdayakan petani, anggota gapoktan tidak lagi menjadi petani yang rendah pengetahuan dan yang lainnya. Dengan berdayanya anggota gapoktan maka anggota gapoktan menjadi petani yang dinamis tidak statis, mau berubah menjadi yang lebih baik guna menuju petani yang lebih berdaya yang mampu mengangkat derajat hidup keluarganya dengan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan keluarganya.

C. Pertanyaan Penelitian

- 1) Apa langkah-langkah yang dilakukan gapoktan guna untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya ?
- 2) Strategi apa saja yang dilakukan gapoktan dalam merubah pola pikir anggotanya ?
- 3) Selaku mediator, langkah apa yang harus dilakukan gapoktan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian anggotanya ?
- 4) Apa saja yang dilakukan gapoktan ketika panen raya supaya anggotanya tidak mengalami kerugian sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi ?
- 5) Kendala apa yang dihadapi gapoktan dalam proses pemberdayaan anggota gapoktan?
- 6) Apa yang menjadi faktor pendukung dalam proses pemberdayaan petani tersebut?